

# EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENJAGA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Ryan Evananda Idrus Indas

NPP. 30.1372

Asdaf Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email : [evananda.ryan@gmail.com](mailto:evananda.ryan@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Dr.Drs.H. Mu'min Ma'ruf,S.H, M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/ Background (GAP) :** *Public order and community security are conditions in which society can carry out daily activities in a peaceful, orderly, and organized manner to support sustainable development in the region. There are various cases of violations related to public order and community security that occur in Kendari City, such as violations of loose animals, administrative permit violations, street vendors, alcohol distribution, violations related to population administration, vagrants, beggars and street children, and couples caught in a boarding house raid. To solve these problems, the researcher used the Effectiveness theory by Tangkilisan (2007). The purpose of this research is to determine the effectiveness of law enforcement of public order and community security by Satpol PP in Kendari City, the inhibiting factors of the performance effectiveness of Satuan Polisi Pamong Praja, and the factors that can increase the effectiveness of the performance of Satuan Polisi Pamong Praja. The method used in this study is descriptive qualitative method by providing facts and data that occurred in the field through data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. Sampling techniques used are purposive sampling and snowball sampling. The results of this study show that the effectiveness of law enforcement of public order and community security by Satuan Polisi Pamong Praja in Kendari City has not been effective. This can be seen from the education of Satpol PP members, the lack of facilities and infrastructure, the level of skills, and the completion of tasks by members of Satuan Polisi Pamong Praja in Kendari City to suppress various violations. The conclusion of this study is that law enforcement of public order and community security has not been effective. The researcher suggests that Satpol PP conducts a detailed analysis of the needs of human resources, optimizes the available facilities and infrastructure, conducts regular training and coaching for its members, and increases the provision of awards to improve employee performance in carrying out their duties.*

**Keywords:** *Public Order, Peace, Effectiveness, Satpol PP*

## ABSTRAK

**Pernyataan Masalah/ Latar Belakang (GAP) :** Ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat ialah gambaran sebuah kondisi dimana masyarakatnya dapat melaksanakan kegiatan serta aktifitas sehari-hari dengan tenteram, teratur, serta tertib sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkelanjutan. Ada berbagai kasus pelanggaran terkait ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat yang terjadi di Kota Kendari seperti pelanggaran hewan lepas, pelanggaran administrasi izin usaha, pedagang kaki lima, peredaran minuman beralkohol, pelanggaran yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, gelandangan, pengemis dan anak jalanan, serta pasangan mesum saat razia kosan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori Efektivitas dari Tangkilisan (2007). **Tujuan** Penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penegakan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satpol PP di Kota Kendari, Faktor penghambat Efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Serta mengetahui faktor yang dapat meningkatkan Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. **Metode** yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran fakta serta data yang terjadi dilapangan melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. **Hasil penelitian** ini menunjukkan efektivitas penegakan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari sisi pendidikan para anggota Satpol PP, kurangnya sarana dan prasarana, tingkat keterampilan serta penyelesaian setiap tugas dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari untuk menekan adanya berbagai pelanggaran. **Kesimpulan** yang dapat diperoleh pada penelitian ini yaitu penegakan Ketenteraman dan ketertiban Umum belum berjalan dengan efektif. Peneliti memiliki saran antara lain Satpol PP melakukan analisis kebutuhan SDM yang detail, mengoptimalkan sarana dan prasana yang tersedia, melaksanakan pelatihan dan pembinaan kepada anggotanya secara rutin, serta meningkatkan pemberian penghargaan agar dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam menjalankan setiap tugas yang diemban.

**Kata Kunci : ketertiban, ketenteraman, efektivitas, Satpol PP**

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk kemandirian sebuah daerah didalam mengatur urusan rumah tangganya yakni adanya kewenangan guna mengeluarkan suatu perda. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong terealisasinya desentralisasi secara maksimal. Agar terwujudnya hal tersebut, pemerintah Kota Kendari sebagai pelaksana otonomi daerah mengeluarkan suatu Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 tahun 2012 mengenai “Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari”. Menurut

data yang bersumber dari akun resmi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari (@satpolpp.kotakendari) Mulai dari bulan Mei jumlah pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) terdapat sebanyak 4 kasus. Pada bulan berikutnya jumlah nya meningkat menjadi 7 kasus. Bulan juli terjadi penurunan kasus sebanyak 5. Namun sangat disayangkan pada bulan agustus jumlah kasus pelanggaran kembali meningkat jauh dari sebelumnya hingga berjumlah 11 kasus pelanggaran. Untuk saat ini yang paling sering ditemui pelanggaran berkaitan dengan ketertiban umum serta ketenteraman di warga yakni ditemukan banyaknya pedagang liar yang menjajakan barang jualannya di tempat tempat yang tidak seharusnya yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Kendari. Meskipun regulasi telah ditetapkan, namun faktanya dilapangan masih banyak ditemukan pelanggaran. Peraturan Daerah Kota Kendari No 10 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan pelaksanaannya yang optimal. Dalam rangka menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari membentuk tim operasi/razia bernama "razia cipkon" atau razia cipta kondisi sebagai bagian dari program penegakan hukum daerah. Setiap minggu, tim ini melakukan razia rutin pada hari Rabu dan Sabtu malam.. Dalam konteks tersebut, meskipun Satuan Polisi Pamong Praja sering melakukan operasi/razia rutin, namun masih terjadi peningkatan jumlah kasus pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman warga. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas implementasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Secara aktual terdapat permasalahan penting yang berkaitan dengan efektivitas kinerja satuan polisi pamong praja kemudian melatarbelakangi penelitian ini. Adapun permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut data yang bersumber dari akun resmi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari (@satpolpp.kotakendari) Mulai dari bulan Mei jumlah pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) terdapat sebanyak 4 kasus. Pada bulan berikutnya jumlah nya meningkat menjadi 7 kasus. Bulan juli terjadi penurunan kasus sebanyak 5. Namun sangat disayangkan pada bulan agustus jumlah kasus pelanggaran kembali meningkat jauh dari sebelumnya hingga berjumlah 11 kasus pelanggaran. Untuk saat ini yang paling sering ditemui pelanggaran berkaitan dengan ketertiban umum serta ketenteraman di warga yakni ditemukan banyaknya pedagang liar yang menjajakan barang jualannya di tempat tempat yang tidak seharusnya yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Kendari
- 2) Berdasarkan hasil wawancara via telfon bersama dengan Bapak Ariezal Musaputra, SH, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penegakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari terdapat berbagai kasus pelanggaran yang berkaitan dengan ketertiban umum dan keamanan warga. Contohnya, kasus penanganan hewan liar, pelanggaran administrasi izin usaha, keberadaan pedagang kaki lima, konsumsi minuman beralkohol, pelanggaran administrasi kependudukan, dan kasus terkait dengan PGOT (Pengemis,

Gelandangan, dan Orang Terlantar).

- 3) Meskipun regulasi telah ditetapkan, namun faktanya dilapangan masih banyak ditemukan pelanggaran. Peraturan Daerah Kota Kendari No 10 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan pelaksanaannya yang optimal. Dalam rangka menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari membentuk tim operasi/razia bernama "razia cipkon" atau razia cipta kondisi sebagai bagian dari program penegakan hukum daerah. Setiap minggu, tim ini melakukan razia rutin pada hari Rabu dan Sabtu malam. Dalam konteks tersebut, meskipun Satuan Polisi Pamong Praja sering melakukan operasi/razia rutin, namun masih terjadi peningkatan jumlah kasus pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman warga

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya dalam konteks efektivitas kinerja satuan polisi pamong praja. Penelitian pertama dari Muhammad Ilham Buana dengan judul Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung) mengangkat permasalahan tentang penertiban pengemis di daerah asal penulis. Penulis menganalisis permasalahan tersebut dalam sudut pandang Tinjauan Fiqih Qiyash yang sesuai dengan Peraturan Daerah di daerah asal peneliti (Muhammad Ilham Buana, 2018). Penelitian kedua dari Yudha Iham Pratama dengan judul penelitian Efektivitas Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Muara Enim, Penulis mengangkat masalah mengenai Upaya Satuan Polisi Pamong Praja untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman di daerah asal peneliti. Peneliti juga meninjau apa saja yang dapat dilakukan untuk menekan pelanggaran Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Tujuan peneliti ialah untuk melihat efektivitas tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di lokasi penelitian penulis. Disamping itu, Mencari cara yang efektif bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Untuk mecapai tujuan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018:13) penelitian kuantitatif ialah penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Yudha Iham Pratama, 2018). Penelitian ketiga dari Okma Sandra, Suryanef, Henni Muchtar pada tahun 2018 dengan judul penelitian Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mewujudkan Ketenteraman warga serta Ketertiban Umum di Batang Kapas ditemukan hasil penelitian ada Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pengembangan peternakan di daerah ini antara lain ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas, rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat setempat, kurangnya sosialisasi yang efektif, terbatasnya lahan yang bisa digunakan untuk peternakan, dan pengawasan yang tidak cukup oleh pihak berwenang. Di sisi lain, ditemukan bahwa Satpol PP menggunakan pendekatan yang humanis dan persuasif kepada masyarakat, sehingga prosesnya

berjalan lancar (Okma Sandra, Suryanef, Henni Muchtar, 2018).

#### **1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu dimana pada penelitian pertama Lebih fokus meninjau dalam sudut pandang Fiqih Qiyasah, pada penelitian kedua metode penelitian yang digunakan berbeda. Peneliti kedua menggunakan metode kuantitatif. Pada penelitian ketiga lebih Melihat upaya yang dilakukan oleh Satpol PP didalam menegakan ketertiban umum serta ketertiban warga. Perbedaan yang paling mencolok adalah perbedaan lokasi penelitian yang dilakukan.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Kendari.

### **II. METODE**

peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Menurut Sugiyono (2019:18), metode penelitian kualitatif didasarkan pada filosofi postpositivisme dan digunakan untuk mempelajari kondisi objek yang alami daripada eksperimen. Metode pengumpulan data meliputi triangulasi (gabungan), analisis data induktif/kualitatif, dan temuan penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Peneliti juga menggunakan metode induktif dalam penyusunan ini. Menurut Erliana Hasan (2011:174) dalam Sugiyono (2019), metode induktif dimulai dengan realita yang ada, menganalisisnya, dibuat pertanyaan, dan kemudian menghubungkannya dengan teori, proposisi, dan hukum yang sesuai sebelum mencapai kesimpulan pernyataan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Triangulasi yaitu dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan 10 (sepuluh) orang informan. Analisis data dengan penyajian data, reduksi data, analisis deskripsi serta penarikan kesimpulan. Adapun analisisnya menggunakan konsep Efektivitas dalam *Tangkilisan (2007:14)*.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti menganalisis Efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di kota kendari provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan konsep Efektivitas dalam *Tangkilisan (2007:14)* adapun pembahasan dapat dilihat dalam subbab berikut :

#### **3.1 Pencapaian Target**

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang peneliti peroleh langsung dari para informan selaku pimpinan serta pejabat terkait yang bertanggung jawab langsung didalam kegiatan dilapangan oleh Satpol PP Kota Kendari. Peneliti menyimpulkan bahwasanya terkait dengan pencapaian target Satpol PP sendiri telah termasuk kedalam kategori baik sebab bisa berkoordinasi serta bekerja sama dengan berbagai instansi terkait didalam penanganan gangguan keamanan serta ketertiban. Tidak hanya itu juga, kelengkapan personil yang turun dilapangan ialah aspek

pendukung hingga dapat berjalan secara optimal apa yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwasanya warga yang ikut berpartisipasi langsung sebagai pemberi informasi mempunyai peran yang sangat penting didalam menjaga keamanan serta ketertiban supaya terciptanya lingkungan yang tertib jauh dari gangguan. Diharapkan kedepannya perihal tersebut tetap berjalan dengan baik serta lancar tanpa hambatan apapun. Selanjutnya terkait dengan pencapaian target mampu ditinjau usaha yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Kendari dinilai cukup maksimal. Razia/operasi rutin dilaksanakan supaya dapat mewujudkan lingkungan yang aman serta damai. Jika ada laporan yang masuk langsung ditindak lanjuti tetapi tidak gegabah didalam pelaksanaannya dengan cara memastikan informasi tersebut benar atau salah.

### **3.2 Kemampuan Adaptasi**

Adaptasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Guna itu diadakan tolak ukur dari proses pengadaan sarana serta prasarana, peningkatan kualitas serta peningkatan sebuah kemampuan. Satpol PP Kota Kendari melaksanakan seluruh upaya didalam meningkatkan efektivitas penegakan trantibum dengan cara meningkatkan performa sarana serta prasarana saat pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kualitas petugas Satpol PP. Sarana serta prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Kendari didalam menunjang kegiatan dilapangan pada saat penertiban telah masuk kedalam kategori baik sesuai kondisi yang ada. Namun sarana serta prasarana yang tersedia masih tergolong sangat kurang. Jadi perihal tersebut menjadi salah satu permasalahan yang menjadi perhatian khusus.

### **3.3 Kepuasan Kerja**

Kepuasan kerja merujuk pada tingkat kepuasan individu terhadap situasi dan kondisi profesi di suatu organisasi yang memungkinkan mereka memperoleh imbalan yang sepadan. Indikator kepuasan kerja dalam penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi pembinaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dan mengukur efektivitas kerja mereka dengan memberikan insentif dari organisasi. Dengan memperhatikan tingkat kepuasan kerja, dapat dilakukan evaluasi terhadap hasil kerja yang telah dicapai oleh anggota apakah sudah efektif atau belum. pembinaan dan pelatihan untuk anggota Satpol PP Kota Kendari masih belum optimal. Hal ini terbukti dari pelaksanaannya yang tidak diselenggarakan dalam beberapa tahun terakhir, baik karena situasi dan kondisi yang sulit selama pandemi maupun kendala yang umum terjadi seperti kurangnya anggaran yang tersedia.

### **3.4 Tanggung Jawab**

Tanggung jawab merujuk pada tindakan yang diambil oleh individu yang merasa memiliki kewajiban terhadap tugasnya dan mempunyai sikap peduli serta jujur yang tinggi. Biasanya, tanggung jawab berkaitan dengan disiplin yang menunjukkan penghormatan terhadap aturan atau peraturan yang berlaku. Dengan demikian, Tanggung jawab merujuk pada kewajiban seseorang untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik dan dilakukan dengan ketaatan penuh terhadap aturan yang berlaku. Ketaatan pada aturan tersebut menciptakan perasaan tanggung jawab dalam diri seseorang. Tanggung jawab serta ketaatan atas aturan didalam masing- masing pelaksanaan kegiatan oleh anggota Satpol PP mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan serta

Kota wajib dilaksanakan dengan baik. Satpol PP mempunyai tanggung jawab yang besar atas warga didalam menciptakan ketertiban umum serta ketenteraman warga serta perlindungan atas masyarakat. masing-masing tugas yang diberikan teruntuk anggota Satpol PP ialah kewajiban yang wajib dilakukan sesuai dengan aturan yang ada serta penuh tanggung jawab, sebab jika mereka tidak melakukan dengan baik serta ditemukan melaksanakan pelanggaran pada saat pelaksanaan tugasnya maka akan mendapatkan sanksi yang tegas dari pimpinan.

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sejauh ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik. anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari dan mengukur efektivitas kerja mereka dengan memberikan insentif dari organisasi. Dengan memperhatikan tingkat kepuasan kerja, dapat dilakukan evaluasi terhadap hasil kerja yang telah dicapai oleh anggota apakah sudah efektif atau belum. pembinaan dan pelatihan untuk anggota Satpol PP Kota Kendari masih belum optimal. Selain itu dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja selalu mengikuti peraturan yang ada apabila terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja sendiri maka akan diberikan sanksi tegas oleh pimpinan.

### **3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Semua pekerjaan serta tugas yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari tidak lepas dari kendala ataupun aspek yang mempengaruhi efektivitas kerja tersebut. Bisa dilihat dari indikator efektivitas hanya beberapa persen yang bisa dicapai. Beberapa poin penting menjadi perhatian peneliti yang merupakan faktor penghambat yang membuat efektivitas penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terganggu. Pada sisi pendidikan, anggota Satpol PP mayoritas bukan PNS atau tenaga honorer, bahkan ada yang hanya lulusan SMA. Selain itu, sarana dan prasarana yang kurang memadai harus segera diperbaiki agar program Satpol PP dapat berjalan secara maksimal dan optimal. Pelatihan yang seharusnya diberikan kepada anggota Satpol PP juga tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya anggaran. Akibatnya, banyak anggota Satpol PP yang masih kurang memahami tugas dan fungsinya secara dasar.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan Belum efektifnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketenteraman dan keamanan di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara hal ini dibuktikan dengan belum semua memenuhi konsep Efektivitas

**Keterbatasan Penelitian :** penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini sendiri hanya dilakukan di Kantor SATPOL PP Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future Work*) :** peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Kendari

Provinsi Sulawesi Tenggara.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, dan Sholawat serta Salam kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga khususnya kepada ibu dan Alm. Ayah yang senantiasa selalu mendoakan, terima kasih kepada orang-orang terdekat sudah selalu memberikan dukungan kepada saya. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada keluarga besar Satpol PP Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian di kantor Satpol PP Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. (2007). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Tangkilisan, H. N. (2015). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Buana, M. I. (2018). TINJAUAN FIQIH SRYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PENERTIBAN PENGEMIS DALAM PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETERTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM (STUDI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BANDAR LAMPUNG). *Ilmu pemerintahan*, 1-13.
- Pratama , Y. I. (2018). EFEKTIVITAS TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MUARA ENIM. *Ilmu Pemerintahan* , 1-9.
- Sandra, O., Suryanef, & Muchtar , H. (2018). UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MEWUJUDKAN KETENTERAMAN WARGA SERTA KETERTIBAN UMUM DI BATANG KAPAS . *Ilmu sosial* , 1-16.





